

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017**

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimanifestasikan dalam visi organisasinya, yaitu:

“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”

dengan misi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. SDM perencanaan pembangunan yang kompeten;

Adapun sasaran, sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis, fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Tahun 2013 – 2018 , adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD
2. Meningkatnya kesesuaian Target Program Renstra OPD terhadap Target Program RPJMD
3. Meningkatnya kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
4. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
6. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
9. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2016 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) secara utuh selama perjalanan Tahun 2016, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 akan semakin memberikan informasi kinerja instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**
Kepala,

Ir. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196401291988031004

Daftar Isi

Eksekutif Summary	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum	I-3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	I-5
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-5
1.6 Isu Strategis	I-9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan	II-1
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018	II-1
2.1.2 Visi dan Misi	II-2
2.1.3 Isu Strategis	II-3
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	II-3

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi	III-1
a. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016.....	III-2
c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2015 – 2016 dan Target Rensta 2013-2018.....	III-5
d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016.....	III-8

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2013 – 2018.....	III-11
f. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi	III-14
g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-16
h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-19
3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja.....	III-24
3.1.3. Realisasi Anggaran Pada Misi Bappeda	III-33
3.1.4. Realisasi Anggaran Mendukung Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda.....	III-33
BAB IV. PENUTUP	IV-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2016	1-8
Tabel 1.2	Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan	1-8
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II-4
Tabel 3.1	Skala Penilaian	III-2
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016 dan target Renstra Tahun 2013-2018	III-5
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016	III-8
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Renstra Tahun 2013-2018	III-11
Tabel 3.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-16
Tabel 3.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-20

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kapasitas Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	I-9
Gambar 3.1 Realisasi Capaian Indicator Tingkat Kesesuaian Pembangunan RKPD dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	III-24
Gambar 3.2. Realisasi Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	III-25
Gambar 3.3 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	III-26
Gambar 3.4 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-27
Gambar 3.5 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Konsistensi dan kinerja penataan ruang	III-28
Gambar 3.6 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan	III-29
Gambar 3.7 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	III-30
Gambar 3.8 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Dengan Penganggaran	III-31
Gambar 3.9 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Aparatur	III-32
Gambar 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Misi BAPPEDA Tahun 2016	III-33
Gambar 3.11 Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2016	III-34

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat

penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.

Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran melalui proses perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukkan melalui performa kinerjanya sebagai salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal besar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

LKIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

- 1 Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2 Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
- 3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
- 4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
- 5 Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Bappeda sebagai OPD utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tingkat provinsi dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan menggerakkan pembangunan regional bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Perannya dalam mengkaji berbagai pilihan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai OPD/SKPD yang strategis di seluruh tingkatan pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya komitmen Bappeda Jawa Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA memiliki tugas pokok: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi, menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek fisik, ekonomi, social dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan. Selain itu, Bappeda memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.

Rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengaturan kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2106 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan ;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :
 - a. Subbidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 - b. Subbidang Non APBD (Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
4. Bidang Fisik, membawahkan :
 - a. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- b. Subbidang Infrastruktur Wilayah
- 5. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Subbidang Pertanian;
 - b. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
- 6. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - a. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan;
 - b. Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum
 - b. Subbidang Kerjasama Pembangunan
- 8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pustalisbang, membawahkan :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi
 - c. Seksi Data dan Analisis
- 9. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya, maka Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pementapan organisasi profesi dari jabatan fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang

merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat telah mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para Pejabat fungsional tersebut diantaranya :

1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Peneliti
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
4. Pejabat Fungsional Pustakawan
5. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian
6. Pejabat Fungsional Umum

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2016

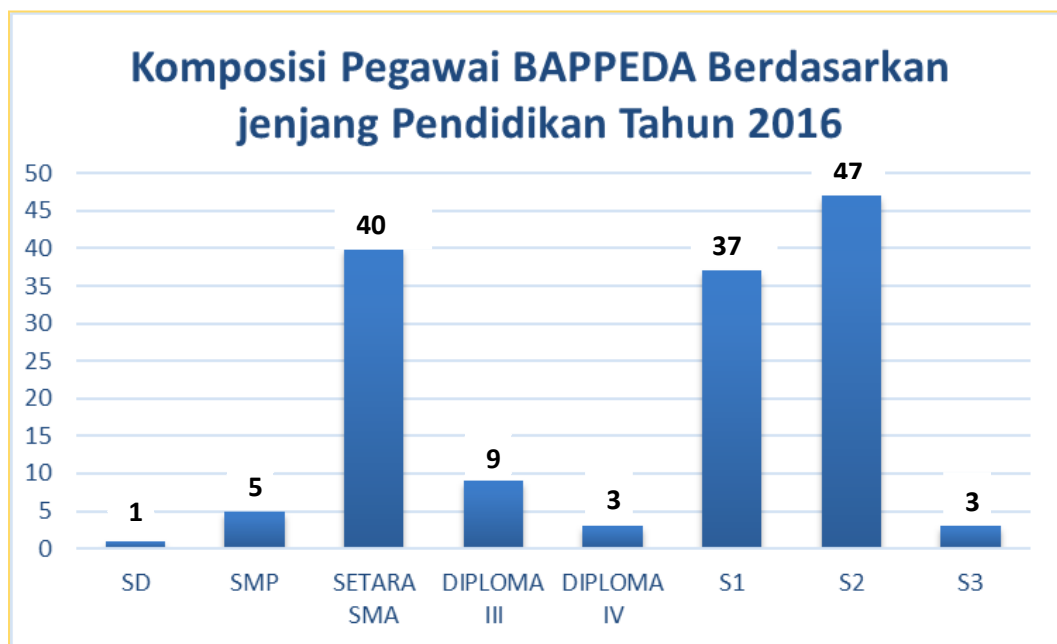
JUMLAH PEGAWAI							
IV/e :	0	III/d :	6	II/d :	6	I/d :	0
IV/d :	3	III/c :	21	II/c :	25	I/c :	4
IV/c :	5	III/b :	43	II/b :	7	I/b :	1
IV/b :	12	III/a :	19	II/a :	5	I/a :	0
IV/a :	26						

Sumber data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Tabel 1.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan

145 ORANG TERDIRI DARI			
Es. I	: -	Es.III :	8 JFT : 33
Es. II	: 1	Es.IV :	15 JFU : 86
1ugas Belajar : 2 orang			

Gambar 1.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber Data : Sekretariat / TU BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

1.6. Isu Strategis

Sebagaimana esensi dari Badan Perencanaan Pembangunan, adalah menuntut seluruh komponen stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Hal ini agar dapat merumuskan strategi berdasarkan pilihan-pilihan yang ada serta sumber daya yang tersedia, Bappeda Provinsi Jawa Barat dihadapkan dengan hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, diantaranya Bappeda dihadapkan kepada tantangan pencapaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, perubahan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pemberlakuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 (UU Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah pembagian urusan/kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan. Nilai strategis Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional seperti : besaran jumlah penduduk, sebagai lumbung pangan nasional, pusat industri manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan pengentasan kemiskinan.

Sementara dari sisi internal sebagai OPD, Bappeda dihadapkan kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan fungsional perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi data-data pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, dirumuskan perencanaan kinerja yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, sasaran, indikator kinerja, dan program. Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terhadap kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat, pada Bab 3 akan diuraikan capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Bab 2.

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1. Perencanaan

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025, Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2013–2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan;

3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Visi ; **”Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”**, serta **misi ke tiga yaitu ”Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”** merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk membangun Provinsi Jawa Barat. Secara umum Bappeda berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi perencanaannya, namun indikator pada misi ketiga yaitu **”Indikator Daya Saing Provinsi”**; **Indeks keterbukaan informasi publik**; dan **Skala komunikasi organisasi pemerintahan**, merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut Bappeda dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

2.1.2. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD yang juga mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimanifestasikan dalam visi organisasinya, yaitu :

Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah :

“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel”

Misi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal

Pernyataan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat, merupakan konsekuensi yang harus diemban oleh Bappeda dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat maupun

Pemerintah Provinsi secara utuh, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta strategi organisasi yang relevan. Seiring dengan perkembangan konstelasi pembangunan daerah, maka Bappeda seharusnya secara akomodatif dan adaptif melakukan reorientasi secara menyeluruh dalam konsep kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan organisasinya.

2.1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013 – 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2016, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani pada tahun 2016 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan belum jelas dan belum terukur
2. Hasil pengendalian dan evaluasi tidak digunakan sebagai dasar perencanaan
3. Konsistensi dan transparansi perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan
4. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Selanjutnya, dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 14 indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018, dipilih 4 (empat) sasaran strategis dan

8 (delapan) indikator sasaran strategis yang dianggap memiliki daya ungkit paling tinggi dalam meningkatkan performa kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat. Kedelapan indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Tiga Indikator Kinerja Utama Gubernur yaitu Daya Saing Provinsi; Indeks keterbukaan informasi publik; dan Skala komunikasi organisasi pemerintahan, merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjajian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2016, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	100
Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	100
Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	100
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	85
	Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	80
Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	85
Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100
	Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	90
	Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	20
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	90

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	90
	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	80
Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	0,1
	Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	35

Berdasarkan indikator kinerja SKPD yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, diidentifikasi ada 14 indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Program-program yang dikerjakan oleh Bappeda pada tahun 2016, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1. Program Penataan Ruang	1.579,307,000
2. Program Kerjasama Pembangunan	1,050,000,000
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	41,723,770,000
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,271,200,000
5. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	390,000,000
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	3,216,980,000

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebagai akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 - 79,9	Baik	
3	50 - 59,9	Sedang	
4	0 - 49,9	Kurang	
5	0	Data Tidak Lengkap	

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun (2016)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4			5
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPd Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPd Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun (2016)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4			5
	RPJMD	Program RPJMD				
3	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP	Persen	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Persen	85,00	87,50	102,94
		Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	Persen	75,00	75,40	100,53
5	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	Persen	75,00	100,00	133,33
6	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00
		Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	Persen	90,00	88,59	98,43
		Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	Persen	20,00	19,99	99,95
7	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan	Tingkat konsistensi pelaksanaan	Persen	90,00	82,00	91,11

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun (2016)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4			5
	pembangunan terhadap rencana pembangunan	pembangunan terhadap rencana pembangunan				
8	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persen	90,00	100,00	111,11
		Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Persen	80,00	85,00	106,25
9	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,09	0,17	188,90
		Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	Persen	31,00	33,33	106,25

Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2016, RKT 2015, dan PK Bappeda 2016.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis badan yang diukur melalui 14 (Empat Belas) indikator.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 telah mencapai targetnya. Namun ada 3 (tiga) indikator yang belum bisa tercapai yaitu Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat, yaitu target 90% baru tercapai 88,59%, dan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, yaitu dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% baru

tercapai 82%. Indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, dari target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 20% tetapi baru dapat tercapai sebesar 19,99%. Dengan kondisi ini, maka BAPPEDA perlu melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun depan dan pada akhir renstra tahun 2018 nanti.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 sebesar 109,91 % (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$(100\% + 100\% + 100\% + 102,94\% + 100,53\% + 133,33\% + 100\% + 98,43\% + 99,95\% + 91,11\% + 111,11\% + 106,25\% + 188,90\% + 106,25 / 14 = 109,91 \text{ (Sangat Baik)})$$

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016 dan target Renstra 2013-2018.

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016 dan target Renstra Tahun 2013 - 2018 pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016 dan
Target Renstra Tahun 2013-2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif	Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	Persen	100	100	100
		Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Persen	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program RPJMD					
		Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Persen	100	100	100
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat	Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Persen	85	87,50	85
			Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	Persen	70	75,40	75
		Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	Persen	87	100	85
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan	Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
			Tingkat layanan satu data	Persen	82	88,59	90

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	n, dan pengawasan		pembangunan Jawa Barat				
			Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	Persen	17,50	19,99	20
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal	SDM perencanaan yang kompeten	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persentase	80	82	90
		Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persentase	97,50	100	90
			Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Persentase	95,00	100	80
		Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Persentase aparatur perencanaan OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	0,06	0,17	0,1
			Persentase SDM perencanaan	Persentase	27,50	33,33	35,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
			terhadap kebutuhan ideal				

Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2016, RKT 2016 dan PK Bappeda 2016

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %		Percepatan (Perlambatan) %
				2015	2016	
1	2	3	4	6		7
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif	Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD	100	100	-
		Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	100	100	-
		Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target	100	100	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %		Percepatan (Perlambatan) %
				2015	2016	
1	2	3	4	6		7
		Pembangunan RKPD	Prioritas Pembangunan RKPD			
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat	Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;	85	87,50	2,50
			Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	70	75,40	5,40
			Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	87	100	23,00
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan	Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	-
			Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	82	88,59	6,59
			Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	17,55	19,99	2,44

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %		Percepatan (Perlambatan) %
				2015	2016	
1	2	3	4	6		7
		Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	80	82	2,00
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal	SDM perencanaan yang kompeten	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	97,50	100	2,50
			Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	95,00	100,00	5,00
			Persentase aparatur perencanaan OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	0,06	0,17	0,11
			Persentase SDM perencanaan terhadap kebutuhan ideal	27,50	33,33	5,83

Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2016, RKT 2016, dan PK Bappeda 2016

Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa secara umum tidak terdapat capaian indikator yang mengalami perlambatan (semua capaian indikator dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan). Bahkan ada beberapa capaian indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan. Ada 4 (empat) indikator yang tidak mengalami peningkatan yaitu : 1) Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, 2) Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD, 3) Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD, dan, 4) Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, hal ini terjadi karena capaian pada indikator tersebut sudah mencapai 100% semua.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2013-2018.

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2013-2018 pada tabel 3.5:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
	RPJMD	RPJMD						
3	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPd	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPd	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;	85	85	87,50	102,94	85	102,94
		Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	70	75	75,40	100,53	75	100,53
5	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	87	75	100	133,33	85	117,64

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
6	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100,00	100	100
		Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	82	90	88,59	98,43	90	98,43
		Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	17,50	20	19,99	99,95	20	99,95
7	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	80	90	82,00	91,11	90	91,11
8	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	95,00	80	85,00	106,25	80	106,25
		Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	97,50	90	100,00	111,11	90	111,11
9	Meningkatnya kompetensi	Persentase aparatur perencanaan	0,06	0,09	0,17	188,90	0,1	170,00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
	sumberdaya aparatur	OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi						
		Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	27,50	31,00	33,33	106,25	35	95,23

f. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2016 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap misi :

Misi Pertama Perencanaan pembangunan yang implementatif dengan Tujuan Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur dan sasaran : 1) Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD, 2) Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD, dan 3) Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD.

Semua indikator yang mendukung misi pertama, yaitu Perencanaan pembangunan yang implementatif, pada tahun 2016 telah tercapai target yang ditetapkan. Terdapat 3 (tiga) indikator pada misi pertama , yaitu : 1) Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, 2) Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD, dan 2) Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD. Realisasi Indikator pada misi pertama sudah tercapai 100% semua. Hal ini berarti indikator pada misi untuk Perencanaan pembangunan yang implementatif sudah memenuhi target pencapaian.

Misi kedua Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat dengan Tujuan Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi yang terbagi ke dalam dua sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; dan Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, dan 2) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota.

Pada hasil realisasi target indikator untuk mewujudkan misi ke dua semua indikator telah tercapai. Ketercapaian indikator tersebut membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar berusaha untuk merealisasikan target yang telah ditentukan pada tahun depan.

Misi Ketiga yaitu Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan dengan tujuan Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan sasaran : 1) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, melalui indikator Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat., dan 2) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, dapat dicapai melalui indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.

Realisasi hasil capaian indikator untuk mewujudkan misi ke tiga : Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan, berdasarkan hasil capaian untuk indikator Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah sudah tercapai 100%. Ada dua indikator yang belum tercapai yaitu Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat dari target sebesar 90%, baru tercapai sebesar 88,59%. Indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, dari target 20% baru tercapai 19,99%. Hal ini membuat BAPPEDA harus lebih berusaha lagi untuk mencapai target pada indikator tersebut.

Misi ke empat yaitu Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal, mempunyai tujuan SDM perencana yang kompeten, dengan sasaran Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dan Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur. Misi ke empat dicapai melalui indikator : 1) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, 2) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, 3) Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, dan 4). Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal.

Hasil capaian pada indikator pada misi tentang Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal, ada empat indikator yang sudah tercapai, dan ada satu

indikator yang belum tercapai. Empat indikator yang sudah tercapai yaitu : 1) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, 2) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, 3) Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, dan 4) Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal. Sedangkan indikator yang belum tercapai adalah indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, dari target 90% tahun 2016 tercapai 82%.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari misi pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA. Badan Perencanaan Pembangunan berhasil memaksimalkan seluruh komponen internal untuk mensukseskan capaian kinerja.

Kegagalan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 ditunjukkan dengan tidak tercapainya target-target indikator dapat dilihat dari tabel 3.2. Indikator yang belum mencapai target terlihat pada indikator pada misi ke tiga dan ke empat. Indikator yang masih belum tercapai pada misi ke tiga adalah Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat, dan Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan. Indikator pada misi ke empat yang belum tercapai yaitu Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.

Hasil analisis untuk kegagalan pencapaian target tersebut untuk indikator di atas yang merupakan indikator sasaran dari misi ke tiga dan ke empat, adalah bahwa indikator tersebut merupakan indikator yang perlu ada kontribusi pihak lain dalam penyelesaian target sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat membutuhkan banyak koordinasi untuk dapat memaksimalkan capaian kinerja.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2016 pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	7	8	11
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas	100	97,64	2,36

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	7	8	11
		Pembangunan RPJMD			
2	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	100	98,22	1,78
3	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	100	94,46	5,54
4	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	102,54	96,45	6,09
		Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	100,53	99,72	0,81
5	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	133,33	84,47	48,86
6	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	98,45	1,55
		Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	98,43	99,35	0
		Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	99,95	97,84	2,11
7	Meningkatnya konsistensi	Tingkat konsistensi pelaksanaan	91,11	99,60	0

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	7	8	11
	pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	pembangunan terhadap rencana pembangunan			
8	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	106,25	82,73	23,52
		Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	111,11	97,95	13,16
9	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	188,90	99,75	89,15
		Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	106,25	91,20	15,05

Berdasarkan analisis dari tabel 3.6 di atas ada indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran dapat terealisasi sepenuhnya bahkan melampaui target yang telah ditentukan, seperti pada indikator Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi. Pada indikator tersebut target pada tahun 2016 sebesar 0,09 %, tetapi pencapaian realisasi mencapai 0,17% yang berarti ada percepatan sebesar 188,90%. Hal ini terjadi karena kegiatan pelaksanaan diklat perencana yang dilakukan oleh Bandiklatren - BAPPENAS tiap tahunnya secara kuantitas mengalami peningkatan yang signifikan. Pencapaian realisasi indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan dari eksternal yaitu kegiatan BAPPENAS. Anggaran pelaksanaan kegiatan untuk diklat perencana semua di tanggung oleh BAPPENAS, sehingga pemerintah daerah tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Ada dua indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu ; indikator tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat dan indikator tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan. Indikator tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat pada tahun 2016 targetnya adalah 90%, tetapi hanya bisa terealisasi sebesar 88,59%. Dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp.

1,397,870,000.00 telah terealisasi sebesar Rp.1,388,819,900.00 (99,53%). Sedangkan pada indikator tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, target tahun 2016 sebesar 90%, hanya tercapai sebesar 82%. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut adalah terdapat pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yaitu sebesar Rp. 41,723,770,000.00. Namun anggaran pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tersebut tidak hanya mendukung sepenuhnya pada indikator tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan. Tetapi alokasi pada program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tersebar untuk mendanai berbagai kegiatan di di bidang-bidang di Bappeda.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut disampaikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2016 pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2016			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	Persen	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,005,000,000	1,957,834,426	97,64
2	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD	Persen	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	2,379,500,000	2,337,147,110	98,22
3	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	Persen	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	1,790,000,000	1,584,085, 700	89,76

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2016			Capaian %	Nama Progam	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Persen	85,00	87,50	102,94	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	2,223,750,000	2,138,872,676	96,45
		Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat	Persen	75,00	75,40	100,53	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	2,201,500,000	2,194,923,546	99,72
5	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota	Persen	75,00	100,00	133,33	Program Penataan Ruang	2,069,307,000	1,777,476,866	84,47
6	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	2,420,810,000	2,371,740,604	98,45
		Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat	Persen	90,00	88,59	98,43	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1,397,870,000.00	1,388,819,900.00	99,35

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2016			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	Persen	20	19,99	99,95	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	871,800,000	842,883,543	97,84
7	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persen	90,00	82,00	91,11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,939,050,000.00	1,932,498,518.00	99,60
8	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Persen	80,00	85,00	106,25	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,670,000,000.00	1,381,617,625.00	82.73
		Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persen	90,00	100,00	111,11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	840,000,000.00	822,786,057.00	97,95
9	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,09	0,17	188,90	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	672,000,000.00	670,323,928.00	99,75
								1,050,000,000	1,048,357,079.00	99,84

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2016			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Kerjasama Pembangunan			
		Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	Persen	31,00	33,33	106,25	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	390,000,000	355,987,000.00	91,20

3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja

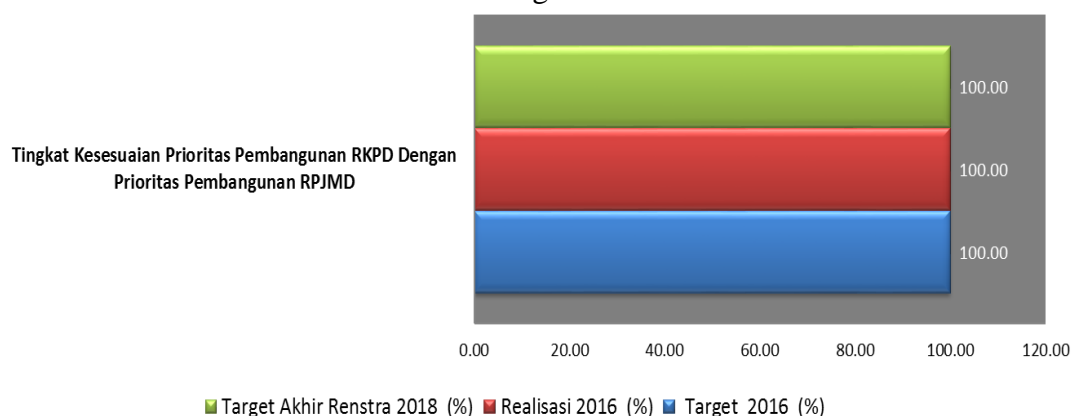
Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018, terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis yang diukur melalui 14 (Empat Belas) indikator Perjanjian Kinerja. Ke-14 indikator kinerja tersebut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda sampai tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 sebesar 109,91% yaitu masuk pada kategori SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala BAPPEDA tahun 2016 telah banyak yang sudah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator yang realisasinya melampaui target.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian Kategori baik tersebut dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi pertama adalah perencanaan pembangunan yang implementatif dengan tujuan perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur. Sasaran yang ingin diraih adalah 1) Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD, 2) Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD, dan 3) Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD.

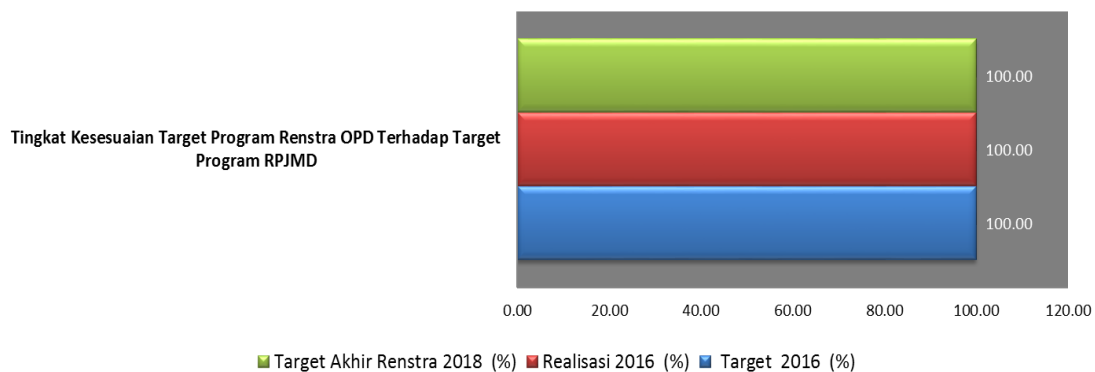
Untuk mendukung pencapaian indikator-indikator pada sasaran strategis Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilakukan melalui upaya penguatan peran hasil evaluasi dalam proses perencanaan, peningkatan peran bidang/balai di Bappeda dalam memanfaatkan data hasil evaluasi perencanaan. .Capaian indikator pada tiap sasaran strategis dapat digambarkan dalam tiga gambar berikut ini :

Gambar 3.1
Realisasi Capaian Indikator Tingkat Kesesuaian Pembangunan RKPD dengan
Prioritas Pembangunan RPJMD



Sasaran strategis pada Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap prioritas pembangunan RPJMD mempunyai satu indikator capaian, yaitu Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD. Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk indikator pertama adalah 100%. Hal ini berarti bahwa target Bappeda pada tahun 2016 untuk mencapai indikator tersebut telah tercapai. Untuk mendukung pencapaian indikator tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD diperlukan peran serta dari pihak eksternal, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat.

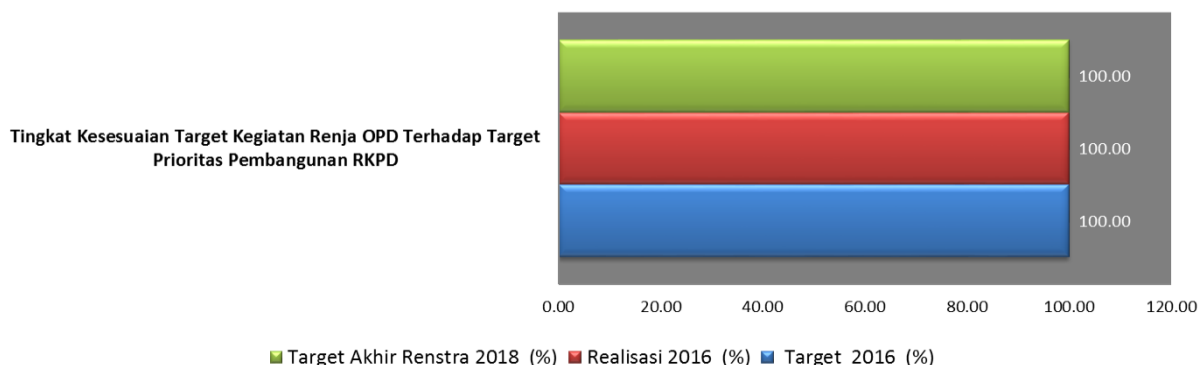
Gambar 3.2
Realisasi Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra
OPD Terhadap Target Program RPJMD



Sasaran strategis pada Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD mempunyai satu indikator yang harus di capai, yaitu Tingkat kesesuaian target program renstra OPD terhadap target program RPJMD. Pada gambar diatas dapat disampaikan bahwa target untuk Tahun 2016 pada indikator tersebut telah tercapai 100%. Bahkan target Renstra yaitu pada tahun 2018 telah tercapai pada tahun 2016 ini, hal ini berarti untuk pencapaian target tahun 2017 dan tahun 2018, Bappeda tinggal mempertahankan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016 ini.

Upaya untuk mencapai realisasi indikator Tingkat kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD ini memerlukan dukungan atau kontribusi dari pihak external, khususnya dari semua OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.3
Realisasi Capaian Pada Sasatran Strategis Meningkatkan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP



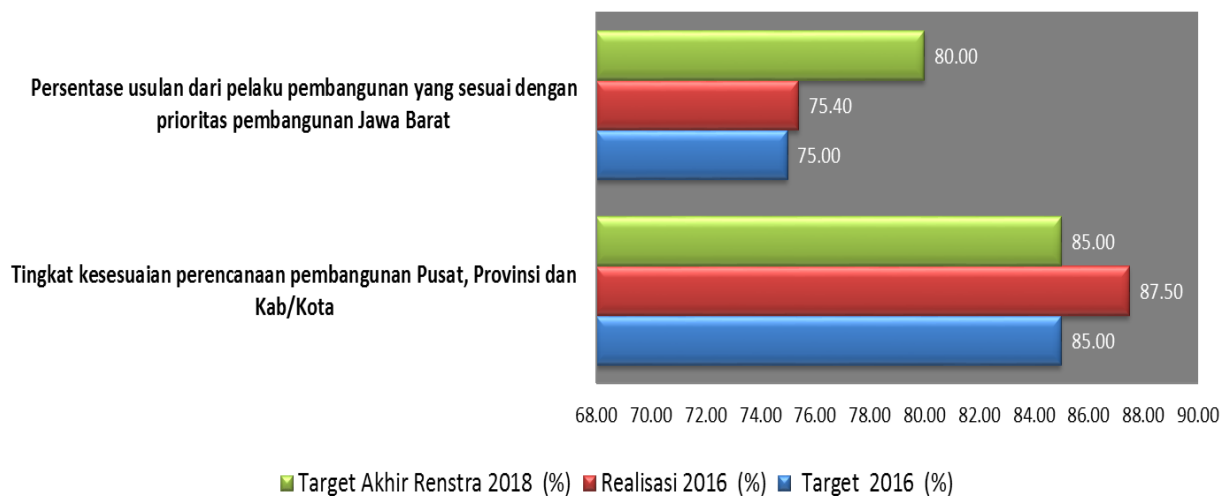
Sasaran strategis pada Meningkatkan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP, mempunyai satu indikator capaian yang harus dicapai, yaitu Tingkat kesesuaian Target Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RPJMD. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi capaian indikator pada sasaran strategis ini telah tercapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda, bahwa target tahun 2016 pada indikator Tingkat kesesuaian Target Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RPJMD adalah 100%.

Realisasi pencapaian ketiga indikator sasaran tersebut sudah mencapai 100%, hal ini berarti tugas pokok Bappeda untuk menyelaraskan target kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dengan prioritas pembangunan dalam RKPDP agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam RPJMD telah dilaksanakan dengan baik.

2. **Misi kedua** adalah Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat. Adapun tujuan dari misi ini adalah perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi yang terbagi ke dalam dua sasaran yaitu:

- Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; dan Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, dan
- Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota.

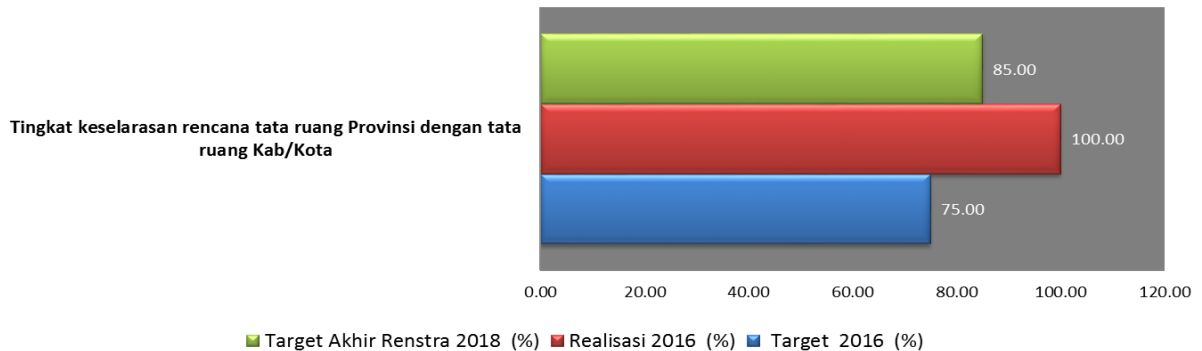
Gambar 3.4
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perencanaan
Pembangunan Daerah



Pada Sasaran strategis meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah mempunyai dua indikator yang harus di capai, yaitu tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; dan Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat. Pada gambar diatas terlihat bahwa untuk indikator prosentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, dari target pada tahun 2016 sebesar 75% telah tercapai 75,40%. Hal ini berarti capaian realisasi pada tahun 2016 telah melampaui dari target yang telah ditentukan sebesar 0,40%. Sedangkan untuk target pada akhir Renstra yaitu tahun 2018 adalah 80%.

Sedangkan pada indikator tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, dari target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 80% telah terealisasi sebesar 87,50%. Hal ini berarti pada indikator tersebut juga telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Bahkan target di akhir Renstra sebesar 85% juga telah tercapai. Dengan ketercapaian pada indikator ini yang telah melebihi target dari Renstra, Bappeda perlu terus meningkatkan kinerjanya, agar realisasi pada indikator tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dapat mencapai 100%.

Gambar 3.5
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatkan konsistensi dan kinerja penataan ruang

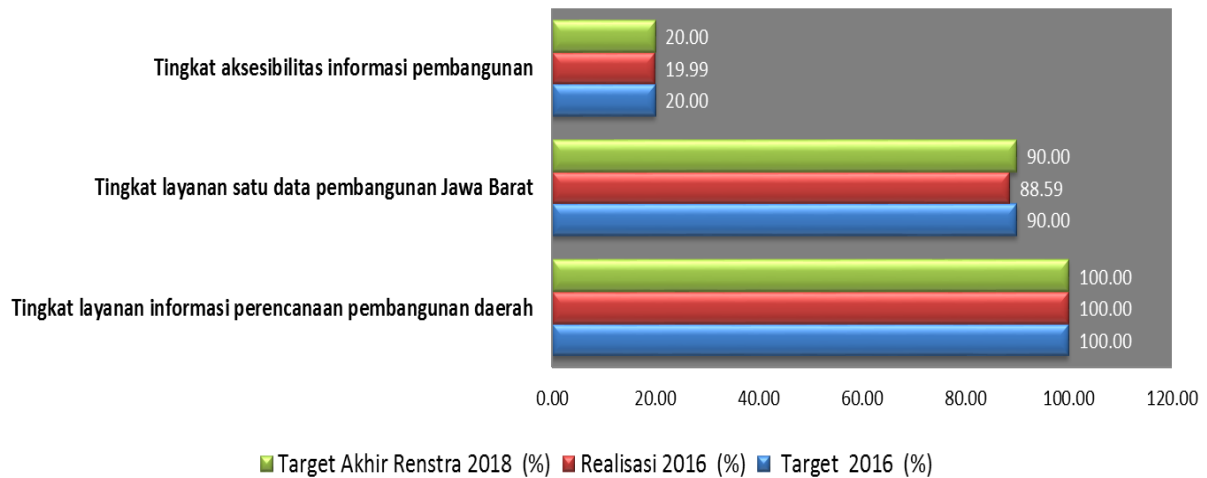


Sasaran strategis Meningkatkan konsistensi dan kinerja penataan ruang mempunyai satu indikator sasaran, yaitu tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota. Pada gambar diatas terlihat bahwa target pada tahun 2016 sebesar 75%, realisasi target sebesar 100%, dan target pada akhir Renstra adalah 85%. Hal ini berarti realisasi pada tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 25%. Bahkan target di akhir Renstra telah dicapai pada tahun 2016 ini. Keberhasilan pencapaian realisasi indikator ini menunjukkan bahwa Bappeda telah bekerja dengan sangat baik. Ketercapaian ini harus terus dipertahankan supaya keselarasan rencana tata ruang antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dapat tercapai dengan baik.

Hasil yang telah dicapai pada indikator untuk mendukung misi ke dua merupakan hasil kerja yang baik, berkat koordinasi dan komunikasi antar tingkat pemerintahan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan optimal dan harus dipertahankan untuk mencapai target misi kedua pada tahun berikutnya.

3. Misi Ketiga yaitu Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan dengan tujuan Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun sasaran dalam misi ini adalah : a) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, melalui indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat., dan b) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, dapat dicapai melalui indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.

Gambar 3.6
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan
Perencanaan Pembangunan

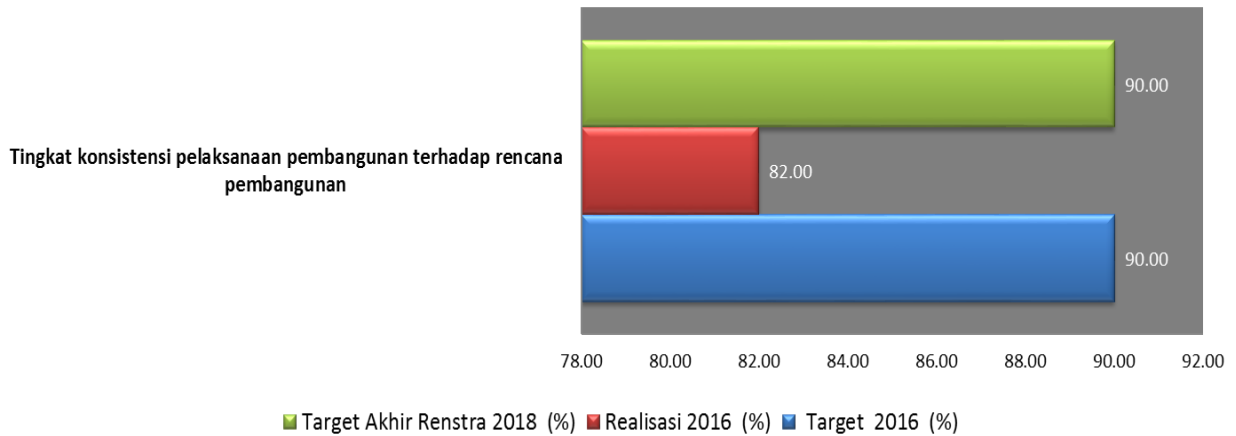


Sasaran strategis Meningkatkan kualitas layanan perencanaan pembangunan, mempunyai tiga indikator sasaran yaitu : Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat dan Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pada misi ketiga ini terdapat tiga indikator sasaran yang tidak mencapai target, yaitu Indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, dari target 20% baru tercapai 19,99% Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat dari target sebesar 90%, baru tercapai sebesar 88,59%; serta Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, yaitu dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% baru tercapai 82%.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pihak di luar Bappeda dalam penyediaan data pembangunan menjadikan target kinerja dalam aksesibilitas dan layanan satu data pembangunan belum dapat mencapai target kinerja dan efisiensi anggaran. Hal ini membuat BAPPEDA harus lebih berusaha lagi untuk mendorong kepedulian pihak terkait terhadap penyediaan anggaran untuk pengumpulan data; meningkatkan ketersediaan sarana pendukung penyimpanan data; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan akses data untuk mencapai target pada indikator tersebut.

Gambar 3.7
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan



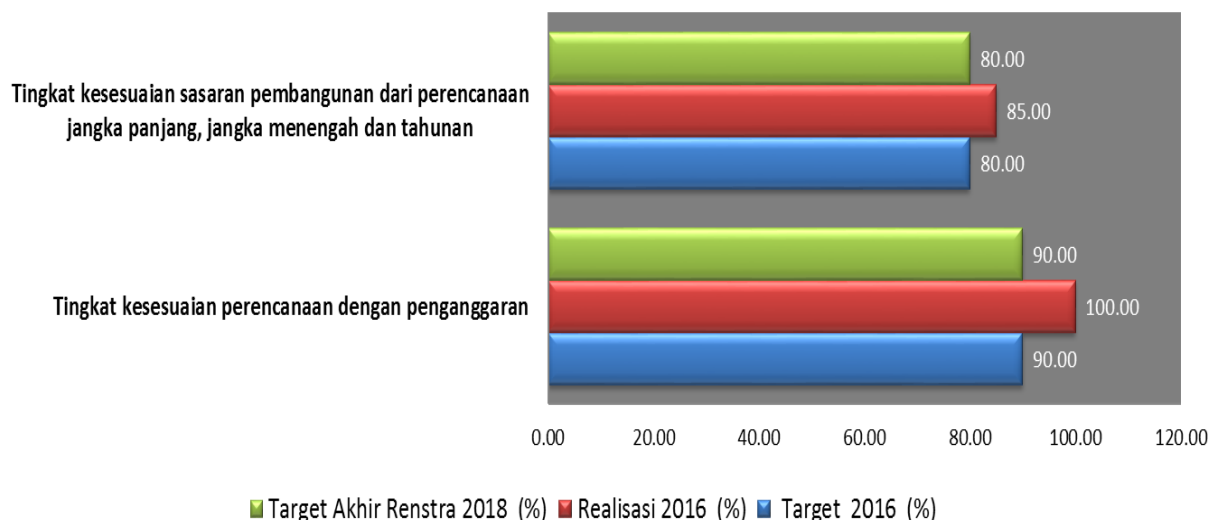
Pada sasaran strategis Meningkatkan Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai satu indikator sasaran yang harus dicapai oleh Bappeda, yaitu tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan. Dari gambar diatas dapat disampaikan bahwa realisasi capaian pada indikator tersebut, pada tahun 2016 Bappeda belum bisa mencapai target yang ditentukan. Dari target 90% baru bisa terealisasi sebesar 82%.

Ketidaktercapaian target pada indikator tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal di lingkungan Bappeda maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bappeda sebagai suatu badan yang mempunyai tugas perencanaan harus mampu melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di internal Bappeda maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara optimal. Faktor eksternal yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut adalah pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan, seperti masyarakat umum, pihak ketiga, factor lelang, dan lain-lain.

4. Misi ke empat yaitu Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal, mempunyai tujuan memiliki SDM perencana yang kompeten, dengan sasaran Meningkatkan kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, melalui indikator sasaran : a) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dan b) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, 2) Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, melalui indikator sasaran : a) Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, dan b). Persentase

SDM perencana terhadap kebutuhan ideal.

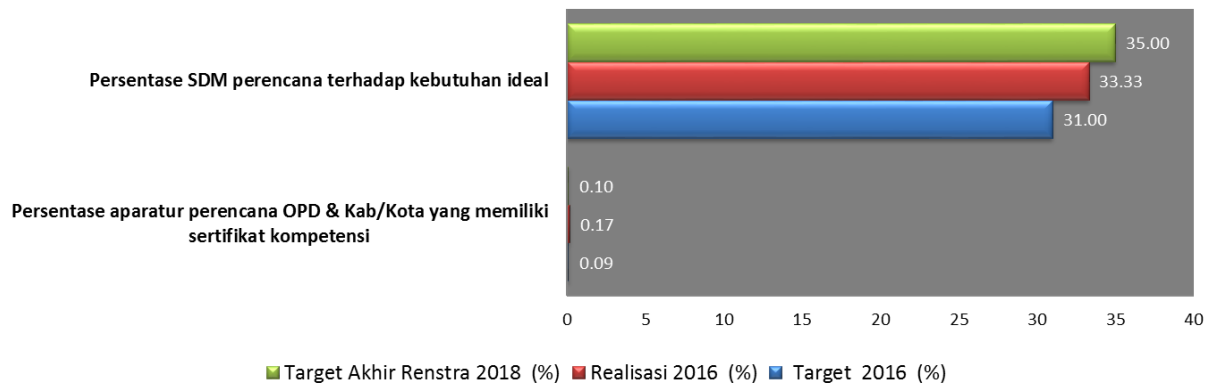
Gambar 3. 8
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kesesuaian Perencanaan
Dengan Penganggaran



Sasaran Strategis untuk Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, mempunyai dua indikator sasaran, yaitu : a) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dan b) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Pada gambar diatas terlihat bahwa ke dua indikator sasaran dalam upaya untuk Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, telah tercapai. Indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dari target yang telah ditentukan sebesar 80%, sudah bias terealisasi mencapai 85%. Indikator tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dari target yang ditentukan sebesar 90%, sudah bias tercapai 100%. Hal ini berarti realisasi capaian pada tahun 2016 telah melampaui target yang telah ditentukan. Bahkan target akhir Renstra pada tahun 2018 juga sudah bisa tercapai pada tahun 2016, hal ini membuktikan kinerja di Bappeda sudah sangat baik.

Keberhasilan Bappeda sudah bisa mencapai target yang telah ditentukan pada sasaran ini dikarenakan adanya konsistensi dan komitmen Bappeda untuk mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang telah disusun baik RPJP, RPJMD, RKPD, maupun Renstra dan Renja.

Gambar 3. 9
Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi
Sumberdaya Aparatur,



Sasaran strategis meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur, dapat dicapai melalui dua indikator sasaran yang harus di capai, yaitu prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal dan Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi. Pada gambar diatas dapat disampaikan bahwa realiasi capaian pada ke dua indikator telah tercapai semua. Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal dari target yang telah ditentukan sebesar 31% sudah tercapai sebesar 33%. Prsentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi dari target yang ditetapkan sebesar 0,09%, talah terealisasi sebesar 0,17%. Realisasi capaian target kedua indikator tersebut sudah melampaui target yang telah ditentukan pada tahun 2016.

Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya kerja sama serta kontribusi yang nyata dari Pusbindiklaten - BAPPENAS selaku penyelenggara diklat, dan OPD – OPD di tingkat daerah. Diklat Perencana yang diselenggarakan oleh BAPPENAS telah secara rutin dilakukan, serta partisipasi dari peserta yang semakin banyak banyak peminatnya. Di Bappeda upaya untuk mendukung indikator Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas / profesionalisme SDM, peningkatan jumlah tenaga perencana dilingkungan BAPPEDA provinsi Jawa Barat, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dan penambahan jumlah SDM.

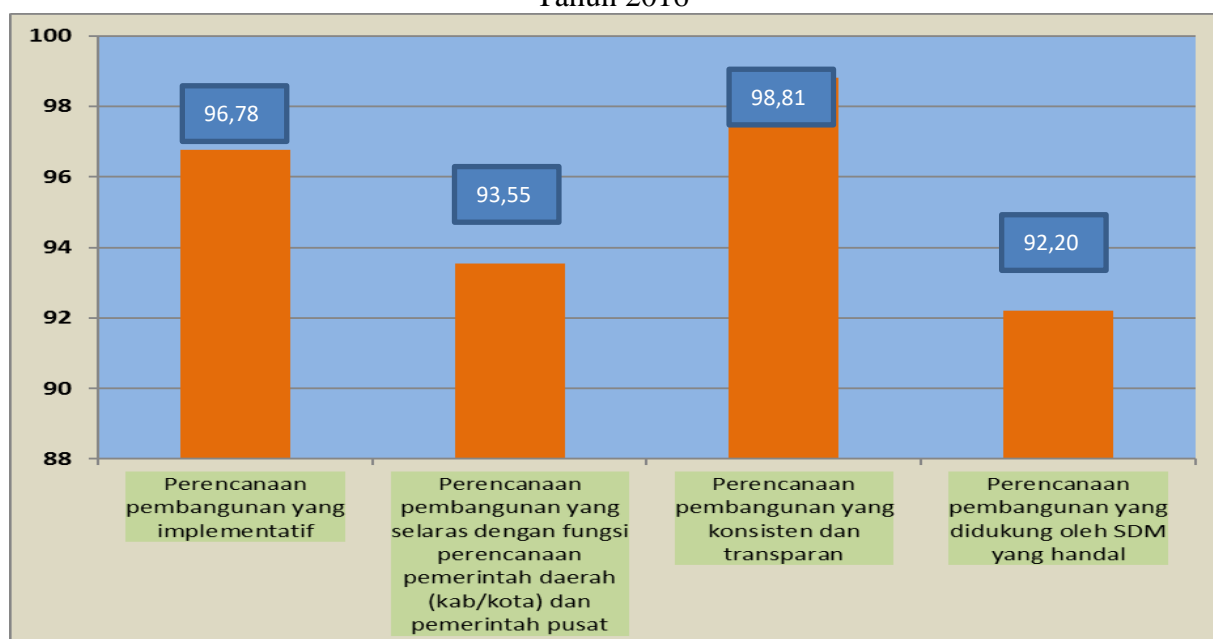
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai target yang telah ditetapkan dari seluruh misi adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak, baik di lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan ekste rnal BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat berhasil memaksimalkan seluruh

komponen internal yang ada, serta mampu memanfaatkan dukungan komponen eksternal untuk mensukseskan capaian kinerja lingkup BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.

3.1.3 Realisasi Anggaran Pada Misi Bappeda

Realisasi Anggaran dalam mencapai Misi Bappeda telah ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.10
Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Misi BAPPEDA
Tahun 2016



Berdasarkan gambar diatas, terlihat capaian realisasi anggaran yang digunakan untuk menunjang dalam pencapaian Misi Bappeda secara umum sudah cukup bagus. Rata-rata realisasi anggaran untuk mencapai Misi Bappeda adalah sebesar 95,58%. Realisasi anggaran untuk masing-masing misi yaitu : Misi pertama : Perencanaan pembangunan yang implementatif terealisasi sebesar 96,78%; Misi ke dua : Perencanaan Pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintahan daerah (Kab/Kota) dan pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 93,55%; Misi ke tiga : Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan, telah terealisasi sebesar 98,81%; dan Misi ke empat : Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal, telah terealisasi sebesar 92,20%.

3.1.4. Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda

Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Bappeda dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.11
Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2016



Dari grafik diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran di lingkungan Bappeda adalah sebagai berikut : Realisasi anggaran paling besar terdapat pada indikator prosentase aparatur perencana OPD dan Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, yaitu sebesar 99,75%. Hal ini wajar karena pada capaian realisasi indikator tersebut terhadap target tahun 2016 mencapai 188,9%. Sedangkan realisasi anggaran pada indikator yang paling rendah yaitu pada indikator tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yaitu sebesar 82,73%. Namun walaupun realisasi anggaran tergolong rendah tetapi realisasi capaian target pada tahun 2016 telah dapat tercapai dan bahkan melampaui dari target yang ditentukan, yaitu dari target 80%, dapat tercapai 85%, dan ada efisiensi anggaran sebesar 23,52%.

Bab IV

Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 109,91%. Secara rinci perhitungan tersebut dihasilkan dari realisasi dari target kinerja yang dikategorikan berhasil dan gagal, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh strategi dalam pemecahan masalah.

Keberhasilan kinerja Bappeda tahun 2016 ditunjukkan dengan adanya 11 (sebelas) indikator kinerja yang sudah tercapai, 4 (empat) indikator tercapai 100% dan ada 7 (tujuh) indikator realisasi capainnya melebihi target (diatas 100%). Kesebelas indikator yang telah tercapai yaitu 1) Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD; 2) Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD; 3) Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD; 4) Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 5) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat; 6) Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota; 7) Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah; 8) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran; 9) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; 10) Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi; 11) Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal.

Hasil analisis untuk keberhasilan pencapaian realisasi target pada inndikator diatas adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak factor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Bappeda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga poetnsi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indicator kinerja tersebut.

Kegagalan untuk kinerja tahun 2016 ditunjukkan dengan tidak tercapainya target untuk (tiga) indikator yaitu : 1) Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat (98,435) ; 2) Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan (99,95); dan 3) Tingkat konsistensi pelaksanaan

pembangunan terhadap rencana pembangunan (91,11%). Hasil analisis untuk kegagalan pencapaian target tersebut untuk indikator diatas yang merupakan indikator sasaran dari misi ketiga, adalah bahwa bahwa ke 3 (tiga) indikator merupakan indikator yang mendapat banyak interpersi dari luar, yaitu besarnya kontribusi pihak lain dalam penyelesaian target sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat membutuhkan banyak koordinasi untuk dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indicator seperti, pada (a) Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat baru terealisasi 98,43%, hal ini dikarenakan untuk layanan satu data pembangunan Jawa Barat ada intervensi dari pihak luar, dan memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar, seperti BPS dan OPD teknis yang keterbatasan sumber data, dan keterbatasan anggaran untuk mendukung hal tersebut. b) Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan (99,95), pada indikator ini Bappeda melalui Balai Pusdalitbang telah melakukan upaya-upaya agar masyarakat bisa mengakses tentang informasi pembangunan, tetapi karena keterbatasan sarana prasarana yang tersedia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, serta kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi yang di gunakan untuk mengakses data, sehingga ketercapaian target belum tercapai; c) Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (91,11%), belum terrealisasinya capaian target pada indicator ini dikarenakan adanya dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi, baik factor internal di lingkungan Bappeda maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bappeda sebagai suatu badan yang mempunyai tugas perencanaan harus mampu melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di internal Bappeda maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara optimal. Faktor eksternal yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut adalah pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan, seperti masyarakat umum, pihak ketiga, faktor lelang, dan lain-lain.

Strategi pemecahan masalah di atas adalah : a) Untuk meningkatkan Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat baru terealisasi, dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melengkapi sumber data yang diperlukan, serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. b) Untuk meningkatkan tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, adalah dengan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pihak-pihak yang membutuhkan, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ilmu teknologi informasi. c)) Untuk meningkatkan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap

rencana pembangunan, adalah dengan melalui koordinasi dan menghimbau kepada para OPD supaya dalam mengimplementasikan perencanaan yang sudah disusun sesuai waktu, cara dan target yang sudah di susun.

Keberhasilan dari pekerjaan yang ditunjukkan melalui capaian kinerja merupakan kerja keras dari seluruh pihak terkait terutama pihak internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bappeda ini kami sampaikan semoga sudah dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2015**